

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sampai pada pelaporan hasil kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini memuat tentang pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020. Program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan target capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan di desa dan kelurahan pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum.

Kuala Tungkal, Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. NOOR SETYO BUDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Sistematika Pembahasan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	9
BAB IV PENUTUP	13
Lampiran; Perjanjian Kinerja 2020	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja, akan dimungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2020 ini, dapat dikatakan kinerja dinas telah dilaksanakan dengan sangat baik, dengan total capaian dari belanja langsung realisasi keuangan sebesar 92,05% dengan realisasi fisik 99,12%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain;

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/XI/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Sosial Dasar
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat
 - c. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam
4. Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Desa dan Bina Administrasi Desa
 - b. Seksi Administrasi dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - c. Seksi Bina Kelembagaan dan Evaluasi Perkembangan Desa

5. Bidang Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa terdiri dari :

- a. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Seksi Bina Pengelolaan Aset Desa
- c. Seksi Fasilitasi Pendapatan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan perdesaan , Bina administrasi pemerintahan desa dan Bina pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
- b. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola yang baik

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA | TAHUN PEMERINTAH DINAS PMD 2020

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas BUM desa dan BUM desa bersama
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan
- c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Persentase Kuantitas lembaga kemasyarakatan
- b. Persentase Kualitas lembaga kemasyarakatan
- c. Persentase Desa Maju
- d. Persentase Kuantitas BUM desa
- e. Persentase Kualitas BUM desa
- f. Persentase Kuantitas BUM desa bersama
- g. Persentase Kualitas BUM desa bersama

Pencapaian sasaran strategis

Strategi adalah cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien adalah;

- a. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, advokasi, dan pemberian motivasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar
- b. Mendorong terbentuknya BUM desa dan pembinaan terhadap BUM desa yang telah terbentuk
- c. Melaksanakan penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya, dan adat istiadat melalui sosialisasi, bimtek, motivasi serta pemenuhan sarana dan prasarana
- d. Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan Perangkat desa dan kelurahan

- f. Melakukan penyusunan tata pemerintahan desa atas dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu pertama sebagai Laporan pertanggungjawaban atas kinerja dinas, yang kedua sebagai sarana evaluasi atas kinerja yang telah dicapai sehingga kedepan bisa lebih baik lagi.

C. Sistematika Pembahasan

- Bab I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

- Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan tentang:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen pelaksanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan beberapa tahun sebelumnya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

- Bab IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

- Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2020

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020, dengan adanya perubahan pada Renstra maka terjadi perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat terlihat pada tabel berikut;

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DPMD Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase kuantitas lembaga kemasyarakatan	90%
		Persentase kualitas lembaga kemasyarakatan	60%
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase jumlah desa maju	10%
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas BUM desa dan BUM desa bersama	Persentase kuantitas BUM desa	100%
		Persentase kualitas BUM desa	33%
		Persentase kuantitas BUM desa bersama	85%
		Persentase kualitas BUM desa bersama	30%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2020 ini sesuai dengan target yang terdapat pada Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat tercapai dengan baik, yang terlihat pada tabel di bawah ini;

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase kuantitas lembaga kemasyarakatan	90%	91%
		Persentase kualitas lembaga kemasyarakatan	60%	45%
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase jumlah desa maju	10%	9%
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas BUM desa dan BUM desa bersama	Persentase kuantitas BUM desa	100%	99%
		Persentase kualitas BUM desa	33%	22%
		Persentase kuantitas BUM desa bersama	85%	54%
		Persentase kualitas BUM desa bersama	30%	33%

Berdasarkan pencapaian kinerja sebagaimana yang terlihat pada tabel III.1, Pada sasaran pertama meningkatnya kuantitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan, dengan target kuantitas 90% dapat tercapai hingga 91%, sedangkan pada kualitas lembaga kemasyarakatan dari target 60% hanya tercapai 45%. Capaian program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan indikator persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif 80% dapat tercapai 71% dan jumlah desa swasembada 16 desa swasembada.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN 2020

Sasaran kedua meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan target persentase jumlah desa maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 10% dapat terealisasi dengan persentase 9%.

Sasaran ketiga meningkatnya kuantitas dan kualitas BUM desa dan BUM desa Bersama. Persentase kuantitas BUM desa dengan target 100% dapat terealisasi 99% (sudah ada 113 BUM desa). Persentase kualitas BUM desa dengan target 30% terealisasi 22%. Persentase kuantitas BUM desa bersama dengan target 70% baru terealisasi 61% (sudah ada 8 BUM desa bersama (3 masih dalam bentuk kesepakatan)). Persentase kualitas BUM desa bersama dengan target 25% dan dapat tercapai 33%.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebesar Rp5.953.348.692,- dengan realisasi sebesar Rp5.639.854.598,- atau sebesar 94,73%. Digambarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel III.2 Total Belanja DPMD Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Belanja Tidak Langsung			
	- Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.246.967.300	3.148.551.391	94,61%
2.	Belanja Langsung	2.706.381.392	2.491.303.207	92,05%
	- Belanja Pegawai	555.570.000	520.570.000	93,70%
	- Belanja Barang dan Jasa	2.097.195.392	1.917.290.367	91,42%
	- Belanja Modal	53.616.000	53.442.840	99,68%
JUMLAH		5.953.348.692	5.639.854.598	94,73%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN 2020

Anggaran yang tersedia untuk menjalankan secara langsung kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.706.381.392,- dengan realisasi sebesar Rp2.491.303.207,- atau sebesar 92,05%. Digambarkan per kegiatan dengan tabel di bawah ini;

Tabel III. 3. Realisasi Belanja Langsung Dinas PMD Tahun Anggaran 2020

No.	Program dan Kegiatan	APBD Murni (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
					Keuangan	Fisik
I	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.100.134.902	740.879.623	685.892.756	92,58%	99,31%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	1.050.000	1.050.000	100,00%	100,00%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.200.000	73.200.000	53.088.220	72,52%	99,99%
03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	135.720.000	135.120.000	126.420.000	93,56%	100,00%
04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.382.191	16.382.191	16.382.191	100,00%	100,00%
05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.702.304	51.702.304	51.702.304	100,00%	100,00%
06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.617.575	16.592.575	16.592.575	100,00%	100,00%
07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	10.075.200	6.383.800	6.383.800	100,00%	100,00%
08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	6.000.000	5.940.000	99,00%	100,00%
09	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.575.000	5.145.000	5.140.000	99,90%	100,00%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	684.962.632	409.403.753	393.493.666	96,11%	97,39%
11	Penyediaan Iklan Layanan	9.600.000	19.900.000	9.700.000	48,74%	95,00%
II	Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur	131.625.000	212.016.000	203.527.040	96,00%	100,00%
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2.616.000	2.600.840	99,42%	100,00%
13	Pengadaan peralatan gedung kantor		51.000.000	50.842.000	99,69%	100,00%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2020**

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00%	100,00%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.875.000	127.650.000	119.334.200	93,49%	100,00%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.750.000	16.750.000	16.750.000	100,00%	100,00%
III	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	17.850.000	24.500.000	24.500.000	100,00%	100,00%
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	17.850.000	24.500.000	24.500.000	100,00%	100,00%
IV	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	-	-	0,00%	100,00%
17	Pengembangan SDM	15.000.000	-	-	0,00%	100,00%
V	Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	20.541.400	20.541.400	20.541.400	100,00%	100,00%
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	20.541.400	20.541.400	20.541.400	100,00%	100,00%
VI	Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	2.068.808.800	1.358.493.917	1.225.116.559	90,18%	97,16%
19	Perlombaan sekretariat posyantek dan alat TTG	82.450.000	36.425.000	34.700.000	95,26%	100,00%
20	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	93.035.000	30.500.000	30.125.000	98,77%	99,67%
21	Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih sehat (LBS)	26.576.000	3.750.000	3.750.000	100,00%	100,00%
22	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.199.646.500	575.545.200	487.907.450	84,77%	94,09%
23	Pembinaan kelompok Dasa Wisma	33.425.000	2.500.000	2.500.000	100,00%	100,00%
24	Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam membangun kawasan pedesaan	123.738.000	75.291.517	70.097.317	93,10%	94,50%
25	Penetapan batas desa	189.730.000	79.730.000	68.880.000	86,39%	92,36%
26	Pembinaan dan lomba desa/kelurahan	91.200.000	77.700.000	77.700.000	100,00%	100,00%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA | **TAHUN**
PEMERINTAH DINAS PMD | **2020**

28	Sosialisasi dan rapat pembentukan tim desa persiapan	55.000.000	53.295.000	46.000.000	86,31%	94,70%
29	Pelatihan dan pembinaan tenaga operator profil desa/kelurahan		249.748.900	235.948.900	94,47%	95,89%
30	Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan siskeudes	174.008.300	174.008.300	167.507.892	96,26%	97,54%
VII	Program : Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	207.862.400	33.225.000	32.100.000	96,61%	97,50%
30	Pembinaan dan pengembangan Bumdes	50.732.500	19.525.000	18.400.000	94,24%	95,00%
31	P2W-KSS	97.910.000	13.700.000	13.700.000	100,00%	100,00%
32	Sosialisasi dan Monitoring BUM Desa Bersama	59.219.900	-	-	0,00%	0,00%
VIII	Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	88.022.000	57.500.000	57.500.000	100,00%	100,00%
33	Pembinaan monitoring dana desa	88.022.000	57.500.000	57.500.000	100,00%	100,00%
IX	Program : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	611.366.200	259.225.452	242.125.452	93,40%	98,13%
34	Fasilitasi penguatan kapasitas bendahara desa	195.623.000	-	-	0,00%	0,00%
35	Pembinaan pengelolaan kekayaan dan aset desa	60.097.600	41.422.600	41.422.600	100,00%	99,99%
36	Pembentukan Tim alokasi dana desa	160.022.600	51.322.600	34.222.600	66,68%	94,39%
37	Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	195.623.000	166.480.252	166.480.252	100,00%	100,00%
JUMLAH		4.261.210.702	2.706.381.392	2.491.303.207	92,05%	99,12%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA | TAHUN PEMERINTAH DINAS PMD | 2020

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, walaupun ada kendala yang dihadapi. Untuk kedepan, agar dapat lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia agar tercapai sasaran strategis yang diinginkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 yang merupakan merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisien. Semoga ditahun-tahun mendatang program dan kegiatan DPMD capaian kinerjanya akan lebih baik lagi, Amin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4



H. NOOR SETYO BUDI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611106 198503 1 003